

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026



RENCANA KERJA
KECAMATAN JATİYOSO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Jatiyoso, September 2025

Kecamatan JATIYOSO



MAHMUD AZIS ARIFIN, S.K.M., M.M

Penata Tingkat 1

NIP. 197312101998031008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatiyoso	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiyoso	II-5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatiyoso	II-13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-15
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	III-3
3.3 Program dan Kegiatan	III-6
3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan PD	III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIYOSO	
4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiyoso	IV-1
4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiyoso	IV-2
4.3 Data Indikatif Kecamatan Jatiyoso	IV-2
4.4 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Kecamatan Jatiyoso	IV-2
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3 Rencana Tindak lanjut	V-1

BAB I PENDAHULUAN

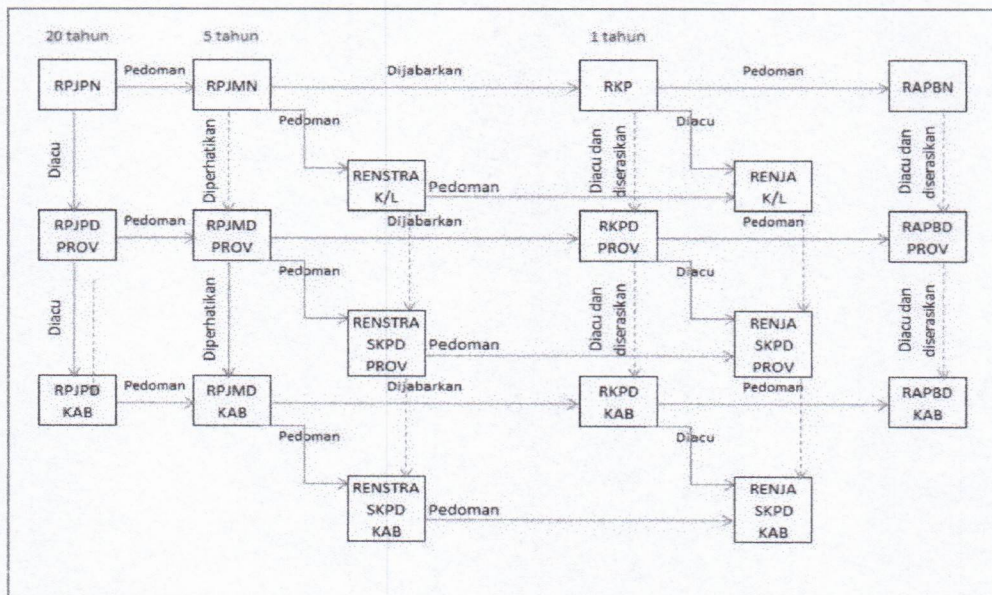
1.1. Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Renja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jangka waktu 1 tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jatiyoso untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar perlu menyusun Rencana kerja dengan maksud untuk memberikan arahan dan gambaran serta pedoman tentang perencanaan kegiatan di Kecamatan Jatiyoso tahun 2026. Adapun maksud di susunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyara adalah sebagaai berikut :

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.
2. Sebagai Bahan Acuan dan arahan bagi Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara professional sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2026 yaitu:

1. Kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.
2. Pelaksanaan Kegiatan lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah di tetapkan baik kuantitas maupun kualitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Jatiyoso, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang analisis Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, serta tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Memuat tentang catatan penting, Kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

BAB. II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN JATIIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatiyoso

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Kecamatan Jatiyoso dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Kecamatan Jatiyoso untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar 2.770.029.635,- (*dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar. Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.558.353.806,- (*dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah*) sisa anggaran Rp. 211.675.829,- (*dua ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*).

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2026 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini:

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Jatiyoso telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD
Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025
di Kecamatan Jatiyoso

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.563.298.220	2.563.298.220	98,8	2.509.038.220	2.509.038.220	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.785.200	9.785.200	97,85.200	9.640.200	9.640.200	100%
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	6.760.200	6.760.200	6.760.200	6.910.200	6.910.200	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	840.000	840.000	840.000	1.300.000	1.300.000	100%
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.695.276.990	1.695.276.990	98,52	1.691.490.434	1.691.490.434	100%
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.695.276.990	1.695.276.990	98,52	1.691.490.434	1.691.490.434	100%
6)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.375.800	38.125.800	92,79	45.944.800	45.944.800	100%
7)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	20.443.500	20.443.500	100%	13.726.300	13.726.300	100%
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.074.680	46.074.680	100%	19.768.400	19.768.400	100%
9)	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	1.450.000	1.450.000	100	3.000.000	3.000.000	100%
10)	Penyediaan bahan logistik kantor	32.591.000	32.591.000	100	26.581.000	26.581.000	100%
11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.808.600	14.808.600	100	15.322.000	15.322.000	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000	750.000	94,38	1.125.000	1.125.000	100%
13)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	137.238.000	137.238.000	100	106.825.000	106.825.000	100%
14)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.946.250	5.946.250	100	7.284.250	7.284.250	100%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.537.500	134.537.500	100	0	0	100%
15)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.500.000	47.500.000	100	25.000.000	25.000.000	100%
16)	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	30.000.000	30.000.000	100	0	0	100%
17)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.037.500	57.037.500	100%	14.012.500	14.012.500	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.475.000	335.475.000	100	334.750.000	334.750.000	100%
18)	Penyediaan jasa surat menyurat	1.875.000	1.875.000	100	1.800.000	1.800.000	100%
19)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	30.000.000	30.000.000	100	33.000.000	33.000.000	100%
20)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	303.600.000	303.600.000	100	80.640.000	80.640.000	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.920.860	128.920.860	112,6	48.844.000	48.844.000	100%
21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.014.000	60.014.000	100	50.038.000	50.038.000	100%
22)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.500.000	100	5.200.000	5.200.000	100%
23)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.406.860	64.406.860	200	0	30	0,00%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.333.450	7.333.450	100	64.708.900	64.708.900	100%
9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.333.450	7.333.450	100	64.708.900	64.708.900	100%
24)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.833.450	4.833.450	100	40.599.750	40.599.750	100%
25)	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	2.500.000	2.500.000	100	24.109.150	24.109.150	100%
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.943.100	56.943.100	100%	201.661.050	201.661.050	100%
12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0,00%	150.000.000	150.000.000	100%
26)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10.190.500	10.190.500	100%	10.657.500	10.657.500	100%
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.007.800	17.007.800	100%	16.894.400	16.894.400	100%
27)	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.744.800	29.744.800	100%	24.109.150	24.109.150	100%
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	39.000.000	39.000.000	100%	133.540.000	133.540.000	100%
15.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keytertiban Umum	39.000.000	39.000.000	100%	133.540.000	133.540.000	100%
28)	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Intasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.000.000	39.000.000	100%	133.540.000	133.540.000	100%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.229.865	86.229.865	101,19	57.780.000	57.780.000	100%
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.229.865	86.229.865	101,19	115.267.300	115.267.300	100%
29)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	81.789.865	81.785.865	100	111.067.300	111.067.300	100%
30)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Keamanan Lokal , Regional dan Nasional	4.440.000	4.440.000	116,67	4.200.000	4.200.000	100%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.010.000	16.010.000	100	65.065.000	65.065.000	100%
17	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.010.000	16.010.000	100	65.065.000	65.065.000	100%
31)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.965.000	3.965.000	100	3.965.000	3.965.000	100%
32)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.615.000	3.615.000	100%	2.400.000	2.400.000	100%
33)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.170.000	1.170.000	100%	2.400.000	2.400.000	100%
34	Fasilitasi Administrasi Tata	4.860.000	4.860.000	100%	54.000.000	54.000.000	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintah desa						
35	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.400.000	2.400.000	100%	2.300.000	2.300.000	100%
	1 urusan 6 Program, 17 Kegiatan, 33 Subkegiatan	2.770.029.635	2.770.029.635	98,89	2.663.841.184	2.663.841.184	100%

Sumber : Kecamatan Jatiyoso, 2025 diolah

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Realisasi APBD di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.563.298.220	2.207.851.289	92,66%	2.105.208.084	951.167.591	42,31%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.785.200	9.785.200	100%	10.395.200	2.133.750	38,80%
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	6.750.000	6.750.000	100%	4.647.700	1.883.750	37,68
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	840.000	840.000	100%	800.000	500.000	62,50
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.430.000	1.430.000	100%	315.000	0	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.695.277.630	1.669.600.589	90,70%	1.741.490.434	935.499.309	82,45%
4)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.695.277.630	1.669.600.589	90,70%	1.741.490.434	935.499.309	82,45%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.625.800	63.518.300	93,83%	160.183.000	16.217.500	35,30%
6)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.443.500	20.443.500	100%	13.726.300	1.834.400	13,00%
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.349.000	13.349.000	100%	19.768.400	1.749.425	43,89%
10)	Penyediaan bahan logistik kantor	32.591.000	32.591.000	99,89%	26.581.000	3.419.000	22,15%
11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.315.000	16.315.000	100%	15.322.000	1.672.900	65,66%
12)	Facilitasi Kunjungan Tamu	750.000	750.000	100%	1.125.000	0	0,00
13)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	124.878.000	124.878.000	100%	106.825.000	5.895.000	25,20%
14)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.946.250	5.946.250	100%	7.284.250	0	0,00%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	10.000.000	100%	0	0	0,00%
15)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.500.000	45.320.122	99,89%	25.000.000	0	0,00
16)	Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	0,00
17)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.025.000	42.750.000	99,89%	14.012.500	0	0,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.475.000	331.111.616	99,01%	115.440.000	8.401.007	41,17%
18)	Penyediaan jasa surat menyurat	1.875.000	1.875.000	100%	1.800.000		0,00%
19)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	30.000.000	25.636.616	83,24%	33.000.000	1.961.007	33,03
20)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	303.600.000	303.600.000	100,00%	80.640.000	6.440.000	41,67
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.597.000	80.358.500	99,55%	55.238.000	6.572.000	36,94
21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per	43.580.000	43.341.500	99,45%	50.038.000	6.572.000	60,71

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
22)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.500.000	100%	5.200.000	0	0,00
23)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.517.000	32.517.000	100%	0	0	0,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.333.450	7.333.450	100%	43.099.750	4.546.700	27,88
9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.333.450	7.333.450	100%	43.099.750	4.546.700	31,12
24)	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.833.450	4.833.450	100%	40.599.750	4.546.700	31,12
25)	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	2.500.000	2.500.000	100%	2.500.000	0	0,00
III. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.443.100	61.443.100	100%	201.653.400	0	0,00
12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	0	0	0,00%	150.000.000	0	0,00
26)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10.190.500	10.190.500	100%	10.657.500	0	0,00
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.007.800	17.007.800	100%	16.894.400	0	0,00
27)	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.244.800	34.244.800	100%	24.109.150	0	0,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	36.810.000	36.810.000	100%	133.540.000	10.400.000	41,67
15.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keyertiban Umum	36.810.000	36.810.000	100%	133.540.00	10.400.000	41,67
28)	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Intasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.810.00	36.810.000	100%	133.540.000	10.400.000	3,34
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.049.865	86.049.865	99,05%	111.067.300	3.400.000	0,00
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.049.865	86.049.865	99,05%	111.067.300	0	0,00
29)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	81.649.865	81.649.865	99,98%	111.067.300	1.400.000	0,00
30)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Keamanan Lokal , Regeonal dan Nasional	4.400.000	4.400.000	100%	4.200.000	2.000.000	48,00
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.315.000	19.315.000	100%	65.065.000	4.200.000	38,43
17	Facilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.315.000	19.315.000	100%	65.065.000	0	0,00
31)	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.965.000	3.965.000	100%	3.965.000	0	0,00
32)	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.615.000	3.615.000	100%	2.400.000	0	0,00
33)	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.615.000	3.615.000	100%	2.300.000	0	0,00
34)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.260.000	3.260.000	100%	2.400.000	0	0,00
35)	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	4.860.000	4.860.000	100%	54.000.000	4.200.000	10,32
	1 urusan 6 Program, 17 Kegiatan, 33 Subkegiatan	2.770.029.635	2.330.366.289	92,99%	2.686.797.184	970.314.291	41,04%

Sumber : Kecamatan Jatiyoso, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.770.029.635,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 2.558.353.806,00 atau 92,99 %, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 89,23%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 1.126.071.738,00 atau 41.04% dari pagu anggaran Rp. 2.686.797.184,00

Tabel. 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.486.981.760	2.386.781.670	87,55	2.563.298.220	2.392.523.394	92,66
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.101.900	7.101.900	100	9.785.200	9.785.200	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27.452.600	27.452.600	100	56.943.100	56.943.100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.321.500	31.321.500	100	39.000.000	39.000.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.323.000	67.323.000	100	86.229.865	86.229.865	99,05
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.250.000	15.250.000	100	17.225.000	17.225.000	100
	Persentase realisasi	2.635.430.760	2.535.230.670	89,23	2.770.029.635	2.601.706.559	92,99
	Rata-rata realisasi 6 program			89,23			92,99

Sumber : Kecamatan Jatiyoso, 2025 diolah

Serapan anggaran selama tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Kecamatan Jatiyoso perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiyoso

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatiyoso berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Indeks kepuasan masyarakat.

Lingkup analisis kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatiyoso meliputi Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan , baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap masa depan Organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi , Faktor kunci keberhasilan ditentukan oleh :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
- Terdapatnya budaya gotong royong yang terus dilestarikan dan telah di tetapkan payung hukumnya
- Terdapatnya Organisasi/lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006
- Terdapatnya Tri Kerukunan Umat beragama
- Terdapatnya Tokoh agama dari masing-masing agama

- Adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas nasional
- Tingginya Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah

Kelemahan :

- Masih banyak penduduk miskin
- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama
- Masih rendahnya kualitas SDM
- Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya Dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat kehidupan toleransi antar umat beragama
- Terdapat usaha ketahanan bersama masyarakat dan aparat keamanan

Ancaman :

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam membangun desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam masyarakat desa
- Munculnya paham agama yang radikal dan ekstrim
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Pada pembahasan sub bab ini kami disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatiyoso, dengan format Tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiyoso dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jatiyoso											
KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Tahun Akhir Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perang at Dacrah tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9.	10	11 = (10/4)
7		Kewilayahan									
7 01		Kecamatan Jatiyoso									
7 01		Kecamatan									
7 01 01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	100	71,05	72	71,05	98,86	75	NA	
			Prosentase Iniktor OPD (IKU dan IKK) yang mencapai targetnya	100	71,05	72	71,05	98,86	73	42,31	42,31
7 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	98,88	100	100	100	100	42,31	42,31
7 01 01 2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja OPD	2	2	2	2	100	2	1	32,68
7 01 01 2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA OPD	2	2	2	2	100	2	2	100

5	02	02	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA OPD	2	2	2	2	100	0	0	0
7	01	01	2.01	05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP OPD	2	2	2	2	100	0	0	0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian realisasi anggaran OPD	100	84,84	100	90,70	100	82,45	82,45	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan tunjangan ASN	15	15	15	15	90,70	15	8	82,45
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100	98,37	100	99,83	100	35,30	35,30	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	12	12	100	12	6	49,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	100	12	6	43,89
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	12	12	12	12	99,89	12	6	22,15
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak penggandaan	12	12	12	12	100	12	6	65,66
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas jamuan makanan dan minuman	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	99,37	12	4	25,20
7	1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Tertatanya Arsip SKPD	12	12	12	12	100	12	12	98,91
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,18	100	100	100	0	0	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	2	2	100	2	2	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	98,76	100	99,01	99,01	100	41,17	41,17

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2	2	2	2	99,40	2	2	50
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	83,24	12	6	33,03	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	100	12	6	41,67	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	96,42	100	99,55	100	36,94	36,94	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	9	9	99,45	9	4	36,94	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor yang memadai	3	3	3	100	3	0	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	1	100	1	1	100	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Index Kepuasan Masyarakat	75	83,15	82,05	83,40	110,09	84,50	27,88	27,88
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	100	99,86	100	100	100	94,80	94,80	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Survey kepuasan masyarakat	1	1	12	12	100	12	94,80	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat	2	2	12	12	100	0	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	99,81	100	100	100	31,12	31,12	31,12

Tabel 2.5.
Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program
Kecamatan Jatiyoso

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Perse n	71,05	Na
	1.	Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Nilai	83,40	Na
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	71,0 5	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	42,31
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	27,88
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	31,12
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	41,67
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	0
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	0

Sumber : Renstra Kecamatan Jatiyoso 2025-2029

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiyoso
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisa
			Th 2024	Th 2025 Smt.I	Th 2024	Th 2025 Smt.I	
1	Nilai SAKIP	Nilai	72	75	71,05	Na	
2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	Tidak dipaka i	0,762	Tidak dipaka i	
3	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya	%	100	100	100	100	
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	82,5	84,50	83,40	0	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	
6	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	
7	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	100	
8	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	0	
9	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	99,05	0	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Jatiyoso sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatiyoso dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:
 - a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
 - b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
 - c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
 - c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
 - e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
 - d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
 - e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Belum optimalnya koordinasi pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
 - b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
 - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa
6. Permasalahan Umum di luar tisi

Kurang representatifnya Kantor Kecamatan Jatiyoso

Kedudukan Kantor Kecamatan Jatiyoso yang berada di tengah pusat kota kabupaten seharusnya memiliki ruang tempat kerja yang representatif baik penataan kantor maupun tempat parkir, kondisi saat ini bahwa ruang kerja camat dan staf dirasa kurang memadai. Karena bangunan saat ini yang digunakan masih bangunan lama sehingga dipandang perlu untuk diadakan rehab agar penataan ruang kerja camat dan staf bisa tertata demi kenyamanan dan pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiyoso, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jatiyoso yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Kecamatan Jatiyoso

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	a. terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan	Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat a. Kurangnya pemerataan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. Seksi Kesejahteraan Sosial a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya pengangguran; d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. Seksi Pelayanan Umum a. Belum Optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan Prasarana c. Belum optimalnya Pengelolaan aset d. Belum Optimalnya sistem kearsipan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- Rancangan Kerangka ekonomi daerah.
- Program prioritas Pembangunan daerah.
- Rencana Kerja , Pendanaan, dan Prakiraan Maju.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD yang di jelaskan dalam Lampirkan tabel berikut :

Tabel 2.8.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jatiyoso

Lembar 1. dari 4

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	KECAMATAN										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA	Kec. Jatiyoso	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	98 %	2.284.509.320,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. Jatiyoso	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	98 %	2.284.509.320,00	
	perencanaan, dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	15.018.636,00	perencanaan, dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	15.018.636,00	
	administrasi keuangan	Kec. Jatiyoso	Cakupan administrasi keuangan	90 %	1.666.928.800,00	administrasi keuangan	Kec. Jatiyoso	Cakupan administrasi keuangan	90 %	1.666.928.800,00	
	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	151.611.884,00	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	151.611.884,00	

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	45.000.000,00	Pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	45.000.000,00
penyediaan jasa penunjang urusan	Kec. Jatiyoso	Cakupan penyediaan jasa	100 %	345.460.000,00	penyediaan jasa penunjang	Kec. Jatiyoso	Cakupan penyediaan jasa	90 %	345.460.000,00
pemerintahan daerah		penunjang urusan pemerintah daerah			urusan pemerintah daerah		penunjang urusan pemerintah daerah		
Pemeliharaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan pemeliharaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	60.490.000,00	pemeliharaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan pemeliharaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	60.490.000,00
2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jatiyoso	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	7.830.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jatiyoso	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	7.830.000,00
Penyelenggaraan Urusan Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ada di Kecamatan	Kec. Jatiyoso	Cakupan Penyelenggaraan Urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit Perangkat daerah yang ada di kecamatan		7.830.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Jatiyoso	Cakupan Penyelenggaraan Urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit Perangkat daerah yang ada di kecamatan		7.830.000,00

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jatioso	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	100 %	88.712.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jatioso	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	100 %	88.712.500,00	
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Jatioso	Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa		71.712.500,00	Koordinasi Kegiatan Desa pemberdayaan Desa	Kec. Jatioso	Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa		71.712.500,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Jatioso	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		17.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Jatioso	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat		17.000.000,00	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Kec. Jatioso	Persentase Wilayah keadaan dalam	100 %	18.191.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Kec. Jatioso	Persentase Wilayah keadaan dalam	100 %	18.191.000,00	
	DAN KETERTIBAN UMUM		konduif			DAN KETERTIBAN UMUM		konduif			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatioso	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	18.191.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatioso	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	18.191.000,00	
5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Jatioso	Persentase Desa /Kelurahan Tertib Perda		97.500.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Jatioso	Persentase Kegiatan Wawasan Kebersihan dan Keagamaan		97.500.000,00	

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penugasan kepala daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penugasan kepala daerah	100 %	97.500.000,00	100 %	97.500.000,00
6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jatiyoso	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	18.861.000,00	100%	18.861.000,00
fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Jatiyoso	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	18.861.000,00	100 %	18.861.000,00
Fasilitasi Penyusunan Peraturan dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Jatiyoso	Fasilitasi, dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	4.310.000,00	100%	4.310.000,00
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Jatiyoso	Fasilitasi dalam rangka Administrasi Pemerintahan Desa	100%	5.460.000,00	100%	5.460.000,00

Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Jatiyoso	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	3.816.000,00	Fasilitasi dalam Kec. Jatiyoso Desa Keuangan dan pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	100%	3.816.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Jatiyoso	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	3.615.000,00	Fasilitasi dalam Kec. Jatiyoso Desa dan Perangkat Desa pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Cakupan Fasilitasi dalam Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	3.615.000,00	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Jatiyoso	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	100%	1.660.000,00	Fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan Fasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	100%	1.660.000,00	

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiyoso pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkompimca, UPT dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar

Bidang : Sarana dan Prasarana							
NO	KEGIATAN PRIORITAS	DESA	MASALAH	ALAMAT/ LOKASI	TARGET/ VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perbaikan ruas jalan hotmixe desa wukirsawit-Tlobo Kabupaten	Desa Wukirsawit – Desa Tlobo	Jalan Rusak	Jl. PU Kabupaten ke Arah Desa wukirasawit-Desa tlobo	1 Paket	100.000.000	DPUPR
2.	Pembangunan Talud Jalan	Desa Wonokeling	Penanggula ngan Jalan Putus	Dusun Ngesep Lor Rt 001/001	1 Paket	230.000.000	DPUPR
3.	Pembangunan dan pengembangan Destinasi wisata desa	Desa wonorejo		Desa wonorejo	1 Paket	150.000.000	Disparpora
4	Perbaikan ruas Beruk jalan s/d Tlobo	Desa Beruk- desa Tlobo	Jalan Rusak	Desa Beruk- Desa Tlobo	1 Paket	300.000.000.	DPUPR

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***“Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;

13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengantechnologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indeks Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskal Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
- 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

- 1) Meningkatkan potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
- 3) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Meningkatkan ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
- 5) Meningkatkan riset dan inovasi;
- 6) Meningkatkan kondusivitas wilayah;
- 7) Meningkatkan pelestarian kebudayaan daerah;
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
- 9) Meningkatkan kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
- 10) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah;
- 11) Meningkatkan akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
- 12) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keanekaragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastruktur jalan yang merata sehingga tercipta "Karanganyar Bebas Jeglongan";
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan modernisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jatiyoso

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Jatiyoso adalah.

Tabel 3.1.**Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026**

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2026
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	80
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	84,25
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	69,20
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	96
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan	%	100

Sumber : Renstra Kecamatan Jatiyoso 2025-2029

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah

Kecamatan Jatiyoso sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pad urusan Perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan daerah seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan pembangunan di Indonesia terus berkembang, dan lembaga perencanaan seperti Kecamatan Jatiyoso harus dapat melihat hal ini, beberapa tantangan akan dihadapi yaitu :

- 1) Semakin kompleksnya isu pembangunan, Kecamatan Jatiyoso memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih adaptif dan inovatif.
- 2) Tantangan kemajuan teknologi. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, Kecamatan Jatiyoso dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.
- 3) Adanya perubahan kebijakan yang konstan dan dinamis dapat memengaruhi kontinuitas dari rencana pembangunan nasional dan daerah. Kecamatan Jatiyoso harus tetap siap menghadapi perubahan politik untuk memastikan keberlanjutan dari program-program yang sudah direncanakan. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bappenas dan Bappeda menjadi kunci sukses dalam menjalankan program pembangunan yang terintegrasi, menjadi tantangan tersendiri.
- 4) Perubahan Iklim seringkali mempengaruhi pelaksanaan suatu rencana, sehingga hasilnya tidak sesuai target. Misalnya untuk urusan pertanian : Perubahan iklim dapat mempengaruhi hasil pertanian dan sumber daya alam di daerah ini, yang dapat berdampak pada keberlangsungan Pembangunan;
- 5) Persaingan dengan daerah lain: Terdapat persaingan dengan daerah lain dalam hal investasi, sumber daya manusia, atau penarikan wisatawan, atau penarikan investor, perbedaan dalam penataaa ruang dll.
- 6) Perubahan Kebijakan Pemerintah yang sering berganti-ganti atau berubah-ubah, kurang mendukung konsistensi rencana pembangunan: Pemerintah dapat mengubah kebijakan yang tidak mendukung pembangunan di daerah ini, seperti pembatasan investasi atau perubahan regulasi yang mempengaruhi sektor tertentu.

3.3.2. Peluang Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan Kecamatan Jatiyoso juga memiliki peluang antara lain adalah :

1. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari sistem perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, menjadi kesempatan yang baik untuk memulai perencanaan yang konsisten, sinkron dan berkelanjutan.
2. Stimulus Pemerintah untuk Pembangunan Daerah: Pemerintah memberikan berbagai insentif dan dukungan untuk pembangunan daerah, seperti program-program pengembangan wilayah dan investasi.
3. Potensi Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kolaborasi antar pihak): Daerah ini memiliki potensi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan swasta atau NGO dalam membangun infrastruktur dan program-program pembangunan.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil: Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang bisa menjadi basis untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi.
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah: disisi lain mendorong muncul dan berkembangnya inovasi-inovasi baru. Pemerintah mengubah kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, seperti perubahan regulasi yang mempermudah investasi dan pengembangan wilayah.
6. Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam beberapa sektor tertentu, seperti pariwisata, pertanian, atau industri yang dapat memberikan peluang bagi daerah ini untuk mengembangkan sektor tersebut.

7. Selain itu, Kecamatan Jatiyoso dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan inisiatif dalam mengembangkan strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Inisiatif seperti pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan promosi energi terbarukan dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan PD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Jatiyoso mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Kecamatan Jatiyoso dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jatiyoso.

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran PD

Sesuai urusan yang ditangani maka Kecamatan Jatiyoso masuk dalam Unsur Kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator PD

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator
Sasaran. 1 Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Presentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2025

3.4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat ditelusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran PD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

			Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regeonal dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2025

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIYOSO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiyoso

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra PD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Jatiyoso di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Administrai Keuangan
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada PD
 - d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 2) Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiyoso

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra PD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jatiyoso, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiyoso merupakan pencapaian kinerja pelayanan Jatiyoso. (lebih lengkap lihat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Jatiyoso

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jatiyoso

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan Pusat.

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN JATIYOSO KAB. KARANGANYAR
TAHUN 2026

[illegible]

7	0	0	0	2.	0	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-	12 bulan	116.044.720,00					serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	89.000.000,00		
7	0	0	0	2.	00	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	7.516.200,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Sema Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	-	12.000.000,00	KECAMATAN JATYOSO				

[illegible]

7	0	0	2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	-	12 laporan 100 %	109.060.000,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Prosentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	-	27.600.000,00		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
7	0	0	2.		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	109.060.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa (DAU)	DANA ALOK ASIM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Prosentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif		27.600.000,00	KECAMATAN JATIWYOS O
7	0	0	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang terkondisikan	-	100 %	99.548.000,00					-	91.207.000,00	
7	0	0	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100 %	99.548.000,00			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	91.207.000,00	

Tabel. 4.2
Target IKU Kecamatan Tahun 2026

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Tahun 2026
1.	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	Nilai	84,25

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program/Kegiatan/Sub kegiatan Kecamatan	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;	Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan SubKegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.120.000
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	Program: Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SubKegiatan : 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	99.5 21.600.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025-2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatiyoso harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso
2. Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
3. Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatiyoso secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi

yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

